

# Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023

Nurul Fitriani <sup>1)</sup>, Devyanthi Syarif <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [Nurulfutriani@student.inaba.ac.id](mailto:Nurulfutriani@student.inaba.ac.id) <sup>2)</sup> [devyanthi.syarif@inaba.ac.id](mailto:devyanthi.syarif@inaba.ac.id)

<sup>12)</sup> *Universitas Indonesia Membangun*

*Jl. Soekarno-Hatta No.448, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266, Indonesia*

Jejak Artikel:

## ABSTRAK

Upload: 20 Januari 2025;  
Revisi: 21 Januari 2025;  
Diterima: 26 Januari 2025;  
Tersedia online: 10 Februari 2025

Kata Kunci:

Belanja Modal;  
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah;  
Pendapatan Asli Daerah;  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;  
SiLPA

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten di Jawa Barat selama tahun 2016-2023. Metodologi studi ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan memanfaatkan data sekunder dari studi pustaka dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menguji asumsi klasik, regresi, korelasi, pengujian hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil studi menghasilkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah, lalu belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari pembahasan tersebut terlihat jelas bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mencerminkan kemandirian, sedangkan pengelolaan belanja modal yang kurang optimal tidak meningkatkan kinerja. Nilai SiLPA yang tinggi menunjukkan anggaran yang efisien, namun harus dibarengi dengan alokasi yang memadai untuk mendukung Pembangunan. Hasil ini mengandung makna bahwa pemerintah kewilayahan perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pengelolaan belanja modal dan memanfaatkan SiLPA secara efektif untuk mencapai Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) yang mengungkapkan bahwa otonomi kewilayahan merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur lembaga dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, institusi daerah perlu memaksimalkan ketentuan-ketentuan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah agar dapat mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada daerahnya.

Diharapkan bahwa desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah dapat menghasilkan hubungan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan di

tingkat lokal (Purwati & Firmansyah, 2024). Maksimalnya suatu daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang selaras dan baik, yang akan menjadikan daerah itu lebih mandiri dan berdaya saing disandingkan daerah lainnya (Ijtihad & Harsono, 2024).

Kemandirian daerah dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan menunjukkan seberapa berhasil daerah tersebut melaksanakan otonomi. Dengan memeriksa rasio keuangan yang berasal dari data laporan keuangan, seseorang dapat mengevaluasi kondisi Kesehatan keuangan pemerintah daerah (Arrasyidah & Syarif, 2024).

Pelaksanaan APBD Jawa Barat hingga Triwulan II tahun 2024 menghasilkan penurunan penghasilan dibanding periode yang sama tahun 2023. penghasilan pemerintah dan hibah sebesar Rp 74,57 triliun atau turun 0,16 persen dibanding triwulan II tahun 2023 dengan mayoritas pendapatan berasal dari penghasilan perpajakan sebesar Rp 71,20 triliun.

Sementara itu, Belanja Negara terealisasi cukup baik dengan hasil realisasi sebesar Rp60,42 triliun atau 48,13 persen dari pagu Rp125,54 triliun dan meningkat 17,72 persen dari pagu Rp 125,54 triliun. Hingga triwulan II tahun 2024, kinerja APBN mengalami surplus sebesar Rp14,15 triliun, bahkan jika dibandingkan periode pemerintahan berjalan pada tahun 2024 (<https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>, 2024).

Sistem akuntansi pemerintahan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang mampu mencerminkan pengelolaan serta administrasi keuangan pemerintah secara transparan. Laporan tersebut berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan telah sesuai dengan anggaran yang telah diputuskan serta tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (Hida et al., 2024).

Kinerja Keuangan ialah hasil dari program serta kegiatan yang ditempuh atau dicapai oleh pemerintah, terutama yang terkait dengan penggunaan anggaran yang dikelola, yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan menggunakan APBD ketika pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola anggaran tersebut (Ika Jatnika et al., 2024).

Untuk mengukur kinerja keuangan, penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). (Abdullah & Mardatillah, 2017) Semakin besar rasionya, maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan kewilayahan.

**Tabel 1. Standar Tingkat Mandiri Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali/Kurang Baik	0% - 25%	Instruktif
Rendah/Kurang	25% - 50%	Konsultatif
Sedang/Menengah	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi/Bagus	75% - 100%	Delegatif

*Sumber: (Kepmendagri No.690.900.327, 1996),diolah oleh peneliti, 2025*

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, maka skala tingkat kemandirian pada Institusi Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023 menunjukkan mayoritas berada pada kategori Rendah Sekali (*Instruktif*) hingga Rendah (*Konsultatif*).

Hal ini mencerminkan bagaimana sebagian besar Kabupaten masih memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap anggaran dari Pemerintah Provinsi. Kabupaten dengan tingkat kemandirian tinggi (delegatif) seperti Bekasi menunjukkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih optimal jika melihat Kabupaten lain.

Berikut data RKKD Kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2016-2023, di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Jawa Barat 2022-2023**

No.	Kabupaten	Tahun 2022		Tahun 2023	
		RKKD	Pola Hubungan	RKKD	Pola Hubungan
1	Bandung	26,65%	Konsultatif	25,79%	Konsultatif
2	Bekasi	75,56%	Delegatif	76,90%	Delegatif
3	Bogor	69,71%	Partisipatif	69,72%	Partisipatif
4	Ciamis	11,76%	Instruktif	10,93%	Instruktif
5	Cianjur	16,82%	Instruktif	17,83%	Instruktif
6	Cirebon	25,12%	Konsultatif	22,74%	Instruktif
7	Garut	11,91%	Instruktif	12,69%	Instruktif
8	Indramayu	20,79%	Instruktif	21,89%	Instruktif
9	Karawang	49,25%	Konsultatif	49,51%	Konsultatif
10	Kuningan	13,46%	Instruktif	12,12%	Instruktif
11	Majalengka	19,44%	Instruktif	21,23%	Instruktif
12	Purwakarta	33,17%	Konsultatif	30,54%	Konsultatif
13	Subang	19,34%	Instruktif	22,42%	Instruktif
14	Sukabumi	21,32%	Konsultatif	21,10%	Instruktif
15	Sumedang	22,83%	Konsultatif	22,30%	Instruktif
16	Tasikmalaya	10,79%	Instruktif	10,52%	Instruktif
17	Bandung Barat	31,12%	Konsultatif	29,18%	Konsultatif
18	Pangandaran	18,61%	Instruktif	19,55%	Instruktif
	Nilai Terendah	10,79%	Instruktif	10,52%	Instruktif
	Nilai Terbesar	75,56%	Delegatif	76,90%	Delegatif
	Rata – Rata	28,14%	Konsultatif	27,74%	Konsultatif

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat data RKKD Kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2022-2023, terlihat bahwa tingkat rasio kemandirian daerah sudah cukup baik. Kemandirian bervariasi di antara Kabupaten, dengan pola hubungan yang didominasi kategori Instruktif dan Konsultatif. Kabupaten Bekasi menunjukkan tingkat kemandirian tertinggi dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 75,56% di tahun 2022 dan meningkat menjadi 76,90% pada tahun 2023, mencerminkan pola hubungan Delegatif. Sebaliknya, nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah dicapai oleh Kabupaten Tasikmalaya dengan 10,79% pada periode tahun 2022 dan 10,52% pada periode tahun 2023, tetap berada pada pola hubungan Instruktif. Secara keseluruhan, Rata-rata RKKD Kabupaten di Jawa Barat sedikit menurun dari 28,14% pada tahun 2022 menjadi 27,74% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan sebagian besar Kabupaten masih bergantung pada pendanaan pusat, dan hanya sedikit yang memiliki kapasitas keuangan yang kuat untuk mendukung kemandirian keuangan kewilayahan.

**Tabel 3. Data Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan**

Regional Kabupaten	Tahun	PAD	Belanja Modal	SiLPA	Rasio Kemandirian
Bandung	2022	1,237,273,508,423	846,920,461,743	746,016,624,046	26,65%
	2023	1,296,821,569,077	932,737,273,162	461,584,215,249	25,79%
Bogor	2022	3,682,559,741,928	1,414,652,065,780	803,205,909,926	69,71%
	2023	3,968,039,031,051	1,304,007,925,132	403,409,687,633	69,72%
Purwakarta	2022	561,927,757,652	211,006,433,159	51,769,042,339	33,17%
	2023	554,854,784,899	221,687,313,491	55,843,834,013	30,54%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

PAD sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 mencakup hasil pemanfaatan kekayaan kewilayahan yang dipisahkan, pajak, retribusi, serta sumber penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PAD menjadi salah satu komponen

utama dalam struktur keuangan kewilayahan yang menggambarkan tingkat kemandirian suatu kewilayahan dalam pembiayaan pembangunan. Dengan mengandalkan PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sumber pendapatan daerah yang pertama dan paling penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan adalah PAD itu sendiri.

Berdasarkan hasil data pada Tabel 3, dapat terlihat hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bandung, Bogor, dan Purwakarta. Secara umum, kualitas keuangan daerah ketiga kabupaten tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik. Tingkat kemandirian keuangan kewilayahan dipengaruhi oleh faktor utama seperti PAD, belanja modal, dan SiLPA. Kabupaten Bogor mencatatkan kinerja keuangan daerah tertinggi dengan rasio kemandirian sebesar 69,71% pada tahun 2022, yang tetap stabil pada angka 69,72% di tahun 2023, mencerminkan pendapatan asli daerah yang konsisten dan kuat. Di sisi lain, Kabupaten Bandung mengalami penurunan rasio kemandirian dari 26,65% pada tahun 2022 menjadi 25,79% pada tahun 2023, meskipun PAD meningkat, hal ini disebabkan oleh lonjakan signifikan dalam belanja modal. Sementara itu, Kabupaten Purwakarta mencatatkan penurunan rasio kemandirian dari 33,17% pada tahun 2022 menjadi 30,54% di tahun 2023, yang dipengaruhi oleh penurunan PAD bersamaan dengan peningkatan belanja modal, menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Modal (Abbas & Hakim, 2021) adalah anggaran oleh rumah tangga dengan perolehan hasil aset lainnya yang akan memberikan kegunaan selama beberapa periode keuangan. Belanja modal pada tabel 3 Kabupaten Bogor tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar Rp 110.644.140.648 dari 1.414.652.065.780 menjadi Rp 1.304.007.925.132, namun pada Tingkat rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,01% dari 69,71% menjadi 69,72%.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian atau studi dikemukakan (Berliani, 2016) yang menunjukkan semakin tinggi Belanja Modalnya, jadi pendapatan daerahnya pun bertambah dan tidak lagi mengandalkan keuangan dari pemerintah sehingga tingkat kemandirian keuangan meningkat. Studi yang dilakukan oleh (Ulqisti & Berliani, 2024) menyatakan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di tingkat institusi daerah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tingkat kemandirian keuangan kewilayahan yang sejalan dengan belanja modal.

SiLPA berdasarkan (UU Nomor 1 Tahun 2022) adalah kekurangan antara pendapatan dengan realisasi belanja dalam satu periode anggaran. Pada tabel 3 menunjukkan SiLPA pada pemerintah Kabupaten Purwakarta dari periode 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.074.791.674 dari Rp 51.769.042.339 menjadi Rp 55.843.834.013, namun pada rasio kemandirian mengalami penurunan sebesar 2,63% dari 33,17% menjadi 30,54%. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Anne, 2023) mengindikasikan bahwa SiLPA mempengaruhi anggaran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kewilayahan.

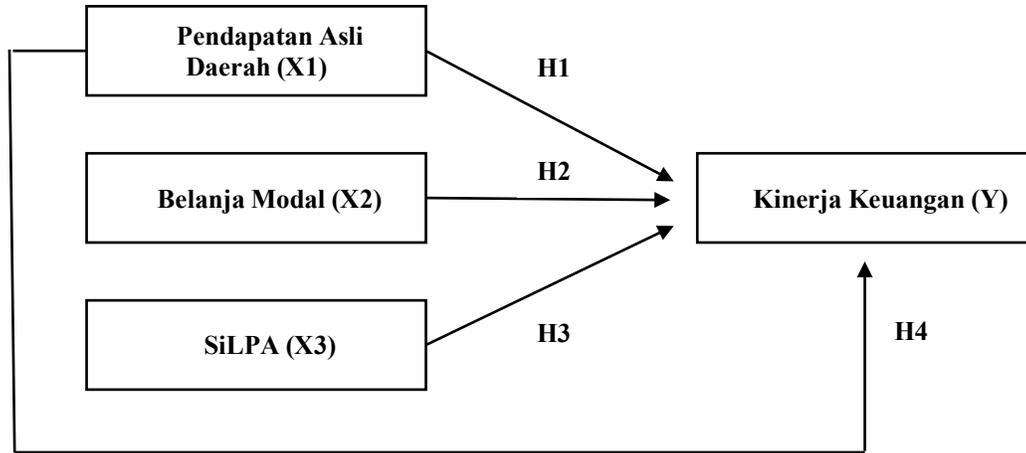
## **Hipotesis**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis studi yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Terdapat pengaruh SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Terdapat pengaruh PAD, Belanja Modal dan SiLPA secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**Kerangka Pemikiran**



Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

**METODE PENELITIAN**

Studi ini melibatkan 18 instansi atau pemerintah daerah di Kabupaten Jawa Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, dengan data Laporan Realisasi Keuangan pada Kementerian Keuangan. Metode yang dipakai dalam studi ini ialah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dipakai ialah data sekunder yang diambil secara *non-probability* sampling atau sampling jenuh.

Metode verifikasi data menggunakan statistik deskriptif, lalu pengujian uji asumsi klasik mencakup (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji koefisien korelasi, dan uji hipotesis baik secara parsial (uji t) maupun simultan (uji f).

**Tabel 4. Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan (Y)	Pengukuran kinerja dapat berfungsi sebagai metode pengawasan organisasi, karena diperkuat melalui penetapan insentif dan konsekuensi. Anggaran disusun berfungsi sebagai kriteria perencanaan dan kinerja. (Lis Djuniar et al., 2018)	<b>Rasio Kemandirian Daerah</b>	
	PAD mencakup seluruh pendapatan yang dihasilkan dalam suatu wilayah itu sendiri yang bersumber dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan daerah (Rafi & Arza, 2023).	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$ (1)	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X1)		Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2023	Nominal
Belanja Modal (X2)	Belanja modal mengacu pada anggaran atau persyaratan untuk	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2023	Nominal

	menghasilkan aset belanja atau aset lain yang akan menghasilkan manfaat selama jenjang akuntansi, ini termasuk tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan berbagai belanja modal lainnya. (Mahmudi, 2019)		
SiLPA (X <sub>3</sub> )	SiLPA adalah selisih lebih atau selisih yang tersisa antara pemasukan dan pengeluaran pembiayaan daerah periode pelaporan tertentu dengan realisasi pemasukan dan pengeluaran yang dikeluarkan. (Fadillah Amin, 2019)	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2023	Nominal

*Sumber: diolah oleh peneliti, 2025*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Metode Statistik Deskriptif

**Tabel 5. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	144	6.92	86.50	26.6197	19.29335
Pendapatan Asli Daerah	144	38.439.843.133	3.968.039.031.051	796.925.027.421	790.598.021.569
Belanja Modal	144	184.898.372.940	1.701.254.453.271	575.766.639.385	309.029.277.575
SiLPA	144	3.811.288.680	1.349.935.661.274	269.580.441.107	281.875.051.125
Valid N (listwise)	144				

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025*

Data Tabel statistik deskriptif, terdapat 144 data valid. Hasil analisis deskriptif di atas menghasilkan kinerja keuangan menunjukkan bahwa nilai min sebesar 6,92 pada tahun 2018 memiliki struktur hubungan instruktif, di mana peran pemerintah lebih dominan jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Sebaliknya, nilai maksimum kinerja keuangan sebesar 86,50 pada tahun 2017 menunjukkan pola keterkaitan konsultatif, di mana saling terhubung oleh pemerintah pusat akan menurun karena lebih dianggap mampu melaksanakan pemerintahan daerah.

*Mean* kinerja keuangan adalah 26,6197 dan standar deviasi 19,29335. Data ini dapat menjadi hak evaluasi agar meningkatnya kinerja keuangan, bagi daerah yang menunjukkan nilai di bawah ketentuan, ini adalah cara menghasilkan adanya variasi yang tinggi dalam kinerja keuangan daerah. Rentang nilai yang luas dan standar deviasi yang cukup tinggi mencerminkan perbedaan signifikan dalam kapasitas pengelolaan keuangan di berbagai daerah

Hasil dari analisis deskriptif Pendapatan Asli Daerah menghasilkan bahwa nilai min sebesar Rp 38.439.843.133 pada tahun 2017 mencerminkan bahwa pemerintah daerah belum bisa menggali sumber kekayaan daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3.968.039.031.051 pada tahun 2023, bahwa pemerintah daerah berhasil menggali sumber kekayaan daerah untuk bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan *mean* Pendapatan Asli Daerah sebesar 769.925.927.421 dengan standar deviasi 790.598.021.569. Hal ini menggambarkan ketimpangan dalam potensi ekonomi dan kemampuan kewilayahan untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD mereka. Usaha peningkatan PAD di

daerah dengan nilai rendah menjadi prioritas penting untuk mendukung kemandirian keuangan daerah.

Dari hasil analisis deskriptif variabel Belanja Modal menghasilkan nilai min dengan total Rp 184.898.372.940 pada tahun 2018 mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki jumlah Belanja Modal yang lebih rendah. Sebaliknya nilai maksimum sebesar Rp 1.701.254.453.271 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah hasil yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat. Adapun nilai rata-rata sebesar 575.766.639.385 dengan standar deviasi sebesar 309.029.277.575.

Hasil analisis deskriptif SiLPA menunjukkan bahwa nilai min yaitu sebesar Rp 3.811.288.680 pada tahun 2018, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tersebut menghasilkan jumlah SiLPA lebih rendah. Sedangkan nilai maksimum yaitu sebesar Rp 1.349.935.661.274 pada tahun 2016, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah SiLPA yang lebih tinggi. Adapun rata-rata dari SiLPA adalah sebesar 269.580.441.107 dengan standar deviasi sebesar 281.875.051.125.

### Uji Asumsi Klasik

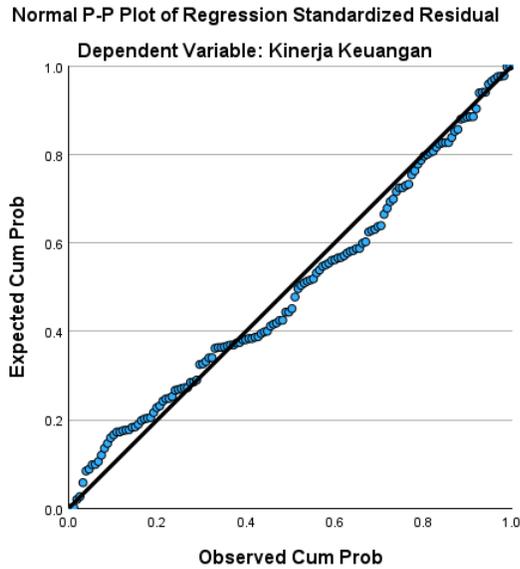
**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.49804293
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.066
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.069

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025*

Nilai p sebesar  $0,069 > 0,05$  pada data di atas menghasilkan bahwa setiap variabel terdistribusi dengan baik dalam data. Penulis menerapkan plot p-p normal dari residual regresi terstandar untuk memeriksa kenormalan dan meyakinkan bahwa model regresi yang dipakai memiliki hasil distribusi normal.

Selain itu, model regresi dapat dianggap memenuhi syarat kriteria kenormalan jika data pengukuran terdistribusi sepanjang garis diagonal pada plot dan bergerak searah garis. Namun, model regresi tidak dapat memenuhi syarat normalitas jika data menyimpang secara signifikan dari garis diagonal. Dengan menggunakan plot p-p normal dari *residual* regresi terstandar, uji normalitas memberikan hasil berikut.



Sumber: Data diolah peneliti, 2025

**Gambar 2. Uji Normalitas terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan pola penyebaran yang teratur dan berdistribusi normal. Hal ini didasarkan pada hasil analisis uji normalitas yang dilakukan menggunakan *P-P Plot of Regression Standard Residual*.

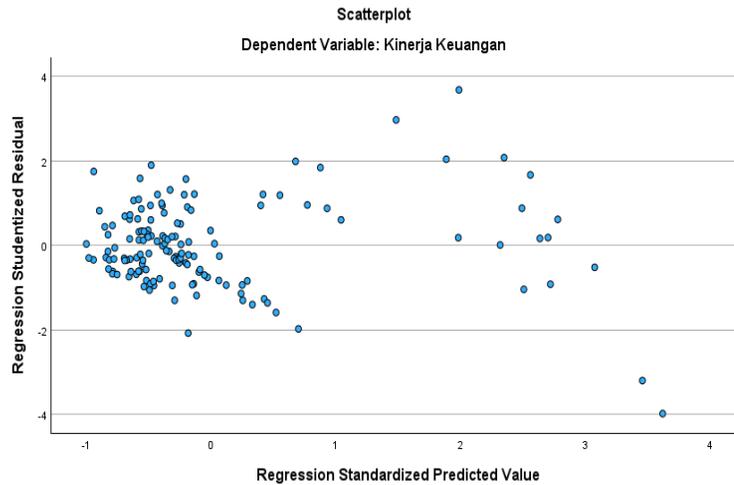
**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	.262	3.820
	Belanja Modal	.354	2.822
	SiLPA	.385	2.598

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat masalah *multikolinearitas*, di mana: untuk variabel “Pendapatan Asli Daerah” nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 3.820 yang nilainya kurang dari 10. Untuk hasil variabel “Belanja Modal” nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 2.822 yang nilainya sama kurang dari 10 dan untuk variabel “SiLPA” diperoleh nilai sebesar 2,598 yang nilainya masih di bawah 10.

## Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

**Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot**

Scatterplot menghasilkan bahwa Titik-titik tersebar menyeluruh di sekitar nilai nol. Penyebaran titik-titik data tidak menghasilkan pola seperti gelombang yang melebar, menyempit, dan melebar lagi. Tidak ada pola tertentu dalam distribusi titik-titik data.

Kesimpulannya ialah tidak ada masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi ini dapat dikatakan baik dan memenuhi persyaratan.

**Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.942 <sup>a</sup>	.887	.884	6.56730	1.966

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Keterangan:

D	dL	dU	4-dua	4-dL
1,966	1,6854	1,7704	2,2296	2,3146

Pengambilan keputusan:  $dU < d < 4-dua$

Dari data tersebut, dihasilkan nilai d sebesar 1,966. Dengan begitu, nilai 1,966 dapat dikategorikan berada diantara nilai dU yang ditentukan dalam tabel, yaitu dL 1,6854 dan dU yaitu 1,7704. maka, ini bisa diartikan bahwa tidak ada autokorelasi. Data dalam pengujian ini tetap sesuai dengan asumsi regresi, sama dengan hasil temuan dari setiap pengujian yang telah dilakukan, yang berarti bahwa keputusan tidak ditolak dan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

## Uji Analisis Regresi Linear

**Tabel 9. Perhitungan Uji regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.007	1.239		9.689	.000
	PAD	2.307E-11	.000	.946	16.996	.000
	Belanja Modal	-1.243E-11	.000	-.199	-4.163	.000
	SiLPA	1.253E-11	.000	.183	3.991	.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Dengan nilai regresi dari *output* pada data tersebut, maka nilai persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,007 + 2,307E - 11X_1 + (-1,243E - 11)X_2 + 1,253E - 11X_3 \quad (2)$$

Persamaan di atas diartikan sebagai berikut:

- $\alpha=12,007$  Hal ini menghasilkan bahwa variabel Kinerja Keuangan (Y) = 12,007 jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>), Belanja Modal, dan SiLPA sama dengan nol (0).
- $\beta_1=2,307E-11$  Hal ini mengindikasikan bahwa nilai variabel Kinerja Keuangan (Y) akan naik sebesar 2,307E-11 untuk setiap satu satuan penambahan variabel Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>), dengan asumsi semua variabel lainnya tetap. Sebaliknya, jika semua variabel lain tetap dan variabel Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) menghasilkan penurunan sebesar satu satuan, maka nilai Kinerja Pemerintah (Y) akan turun sebesar 2.307E-11.
- $\beta_2=-1,243E-11$  Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kinerja keuangan (Y) akan naik sebesar -1,243E-11 untuk setiap satu satuan penambahan variabel Belanja Modal (X<sub>2</sub>), dengan asumsi semua variabel lainnya tetap. Sebaliknya, jika semua variabel lain tetap dan variabel Belanja Modal (X<sub>2</sub>) menghasilkan penurunan sebesar satu satuan, maka nilai Kinerja Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar -1.243E-11.
- $\beta_3=1,253E-11$  Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Kinerja Keuangan (Y) akan naik sebesar 1,253E-11 untuk setiap unit penambahan variabel SiLPA (X<sub>3</sub>), dengan asumsi semua variabel lainnya tetap konstan. Sebaliknya, nilai Kinerja Pemerintah (Y) akan turun sebesar 1,253E-11 untuk setiap penurunan satu satuan pada variabel SiLPA (X<sub>3</sub>), dengan asumsi semua variabel lainnya tetap.

**Tabel 10. Hasil Uji Analisis Koefisien Korelasi Person (*Product Momment*)**

		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	SiLPA	Kinerja Keuangan
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	.798**	.778**	.929**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	144	144	144	144
Belanja Modal	Pearson Correlation	.798**	1	.682**	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	144	144	144	144
SiLPA	Pearson Correlation	.778**	.682**	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	144	144	144	144
Kinerja Keuangan	Pearson Correlation	.929**	.680**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	144	144	144	144

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Dari hasil analisis di atas, terdapat hubungan sebesar 0,929 antara PAD (X<sub>1</sub>) dan kinerja keuangan (Y), yang menunjukkan bahwa PAD dan kinerja keuangan mempunyai hubungan positif sangat signifikan. Sementara itu, belanja modal (X<sub>2</sub>) dan kinerja keuangan (Y) menunjukkan hubungan dengan nilai korelasi sebesar 0,680, yang menghasilkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) dan SiLPA (X<sub>3</sub>) mempunyai hubungan

dengan nilai 0,783, yang menghasilkan bahwa terdapat konektivitas yang signifikan antara belanja modal dengan kinerja keuangan.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 11. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 <sup>a</sup>	.887	.884	6.56730

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

$$KD = R^2 \times 100\% = 0,942^2 \times 100\% = 88,74\% \quad (3)$$

PAD, Belanja Modal dan SiLPA dengan demikian memberikan hubungan secara simultan sebesar 88,7364% terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sedangkan faktor-faktor lain di luar penelitian, seperti ukuran pemerintah daerah, temuan audit, dan karakteristik pemerintah daerah lainnya, berpengaruh sebesar 11,26%. Hal ini menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 88,74%

### Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.007	1.239		9.689	.000
Pendapatan Asli Daerah	2.307E-11	.000	.946	16.996	.000
Belanja Modal	-1.243E-11	.000	-.199	-4.163	.000
SiLPA	1.253E-11	.000	.183	3.991	.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

#### Pengujian Variabel PAD (X<sub>1</sub>)

H<sub>0</sub> : PAD (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

H<sub>1</sub> : PAD (X<sub>1</sub>) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Nilai t tabel sebesar 1,977 dengan derajat kebebasan (df) = 139 dan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Dari hasil perhitungannya yang telah dilakukan di atas, dihasilkan nilai T<sub>tabel</sub> sebesar 1,977 dan nilai T<sub>hitung</sub> untuk pendapatan asli daerah sebesar 16,996. Karena nilai T<sub>hitung</sub> lebih besar dari nilai T<sub>tabel</sub>, maka H<sub>0</sub> ditolak, yang berarti PAD (X<sub>1</sub>) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y).

#### Pengujian Variabel Belanja Modal (X<sub>2</sub>)

H<sub>0</sub>: Belanja Modal (X<sub>2</sub>) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

H<sub>1</sub>: Belanja Modal (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Nilai t tabel sebesar 1,977 dengan derajat kebebasan (df) = 139 dan Tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Dari hasil perhitungan di atas, nilai T<sub>hitung</sub> untuk belanja modal adalah -4,163 dan nilai T<sub>tabel</sub> tetap sebesar 1,977. Karena hasil nilai T<sub>hitung</sub> lebih kecil dari T<sub>tabel</sub> maka H<sub>0</sub> diterima, yang menghasilkan belanja modal (X<sub>2</sub>) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y).

#### Pengujian Variabel SiLPA (X<sub>3</sub>)

H<sub>0</sub>: SiLPA (X<sub>3</sub>) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

H<sub>1</sub>: SiLPA (X<sub>3</sub>) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Nilai <sup>T</sup>tabel sebesar 1,977 dengan derajat kebebasan (df) = 139 dan Tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Pada perhitungan sebelumnya, nilai <sup>T</sup>tabel sebesar 1,977 dan nilai <sup>T</sup>hitung SiLPA sebesar 3,991. Karena hasil nilai <sup>T</sup>hitung lebih besar dari nilai <sup>T</sup>tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak yang berarti SiLPA (X<sub>3</sub>) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y).

**Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47191.248	3	15730.416	364.726	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6038.112	140	43.129		
	Total	53229.360	143			

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025*

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai p (sig) sebesar 0,001 dan nilai <sup>F</sup>hitung sebesar 364,726. <sup>F</sup>tabel sebesar 2,67 dengan α = 0,05 serta derajat kebebasan df<sub>1</sub> = 3 dan df<sub>2</sub> = 139 (n-k-1). Dengan nilai sig 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>4</sub> diterima karena nilai <sup>F</sup>hitung lebih besar dari pada <sup>F</sup>tabel (364,726 > 2,67).

Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan (Y) secara bersama dipengaruhi secara signifikan oleh unsur-unsur PAD (X<sub>1</sub>), belanja modal (X<sub>2</sub>) dan SiLPA (X<sub>3</sub>).

### **Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil uji hipotesis parsial menghasilkan nilai <sup>T</sup>hitung untuk PAD sebesar 16,966 maka nilai <sup>T</sup>tabel sebesar 1,977. Karena hasil <sup>T</sup>hitung > <sup>T</sup>tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak, yang artinya PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan kewilayahan. Hasil uji koefisien korelasi, memberikan PAD berpengaruh sebesar 0,929 terhadap kinerja keuangan Kewilayahan.

Hal ini menghasilkan PAD dalam penerapannya memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023. Hasil ini sesuai dengan studi (Hida et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil uji hipotesis parsial menghasilkan nilai <sup>T</sup>hitung untuk belanja modal sebesar -4,163 sedangkan hasil dari nilai <sup>T</sup>tabel sebesar 1,977. Karena nilai <sup>T</sup>hitung < <sup>T</sup>tabel, maka H<sub>0</sub> diterima, yang mengartikan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil dari pengujian koefisien korelasi, menghasilkan belanja modal berpengaruh sebesar 0,680 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menyatakan bahwa belanja modal dalam penerapannya memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja keuangan kewilayahan pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023. Hasil ini sesuai dengan studi (Rafi & Arza, 2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

### **Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan nilai <sup>T</sup>hitung untuk SiLPA sebesar 3,991 sedangkan nilai <sup>T</sup>tabel sebesar 1,977. Karena nilai <sup>T</sup>hitung > <sup>T</sup>tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak, yang diartikan SiLPA berpengaruh terhadap kinerja keuangan kewilayahan. Nilai uji koefisien korelasi, memberikan SiLPA berpengaruh sebesar 0,783 terhadap kinerja keuangan kewilayahan.

Hal ini menghasilkan bahwa SiLPA dalam penerapannya memiliki hubungan positif yang kuat terhadap kinerja keuangan kewilayahan pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023. Hasil ini sesuai dengan studi (Marliana et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan SiLPA Terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil uji hipotesis secara simultan menghasilkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $364,726 > 2,67$ ) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima.  $H_a$  ini menghasilkan bahwa PAD, belanja modal, dan SiLPA secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan kewilayahan, dengan hubungan simultan yang kuat sebesar 0,942. Selain itu, nilai koefisien determinasinya mencapai 88,74% yang berarti bahwa PAD, belanja modal, dan SiLPA memberikan kontribusi sebesar 88,74% terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 11,26% dipengaruhi oleh faktor lain di luar studi ini, seperti besaran daerah, temuan audit, dan karakteristik pemerintah lainnya.

Hasil studi ini konsisten dengan studi (Lis Djuniar et al., 2018) Hasil studi ini menyatakan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan, PAD tidak mempunyai pengaruh terhadap pemerintah kota. selain itu, keberhasilan pemerintah kota tidak dipengaruhi oleh belanja modal. (SiLPA) memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah kewilayahan. Di Sumatera Selatan, PAD, belanja modal, dan SiLPA secara bersamaan berdampak pada kinerja pemerintah kabupaten dan kota.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan adanya hubungan yang kuat antara kinerja keuangan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Data yang dianalisis menghasilkan variasi signifikan dalam pengelolaan keuangan, seperti PAD, Belanja Modal dan SiLPA di berbagai pemerintah kewilayahan. Studi ini menekankan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah mempengaruhi konektivitas antara institusi daerah dan institusi pusat, dimana sebagian besar kewilayahan masih berada dalam pola hubungan Instruktif yang menggambarkan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Aspek pengelolaan keuangan ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kebijakan fiskal yang lebih adil dan efisien. Secara keseluruhan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi lokal, peningkatan efisiensi Belanja Modal untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel guna mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan keberlanjutan lingkungan.

### **REKOMENDASI**

Pemerintah daerah disarankan untuk fokus pada peningkatan kemandirian keuangan melalui pengoptimalan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah seperti melalui inovasi pajak dan mengembangkan sumber pendapatan daerah. Selain itu, dengan meningkatkan efisiensi dalam mengelola belanja modal perlu ditingkatkan dengan menargetkan proyek-proyek utama yang didasarkan pada analisis biaya terhadap manfaat, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau anggaran secara langsung. Dan mengoptimalkan SiLPA dapat tercapai melalui perancangan anggaran yang lebih tepat dan pemanfaatan sisa dana untuk kegiatan yang membawa hasil. Demi transparansi dan akuntabilitas penerapan sistem informasi keuangan yang dapat

diakses publik dan laporan rutin dapat membantu meningkatkan tanggung jawab. Pemerintah daerah juga perlu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan memperkuat kapasitas fiskal serta meningkatkan kolaborasi antar daerah untuk berbagi praktik terbaik dalam tata kelola keuangan.

## REFERENSI

- Abdullah, A., & Mardatillah, S. (2017). Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Jurnal Fairness*, 7, 189–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/fairness.v7i3.15182>
- Arrasyidah, H., & Syarif, H. D. (2024). *The Effect Of Financial Literacy, Internal Control Systems, And Accounting Information Systems On The Quality Of Msme Financial Statements In Bandung City 1\**. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.1027>
- Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal-Inaba.Hol.Es*, 15(2). <http://>
- Dirvi Surya Abbas, & Mohamad Zulman Hakim. (2021). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224>
- Fadillah Amin. (2019). *PENGANGGARAN DI PEMERINTAH DAERAH*.
- Hida, R., Utami, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). *JURNAL MANEKSI*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2200>
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/>. (2024). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/data-publikasi/kajian-fiskal-regional/3162-kajian-fiskal-regional-kfr-triwulan-ii-tahun-2024-kanwil-djpb-provinsi-jawa-barat-2.html>
- Ijtihad, & Harsono. (2024). *Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Rauhul Ijtihad 1), Iwan Harsono 2)* \*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Ika Jatnika, Dedy Suryadi, & Elda Elfryda Suryadi. (2024). *Membangun Kemandirian Keuangan Daerah: Kasus Pendapatan Asli dan Belanja Modal Pemda Purwakarta*. [https://www.google.co.id/books/edition/Membangun\\_Kemandirian\\_Keuangan\\_Daerah\\_Ka/3HQUEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_Kemandirian_Keuangan_Daerah_Ka/3HQUEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. (n.d.).
- Lis Djuniar, O. :, Dosen, ), Yayasan, T., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Zuraida, I. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Marliana, R., Slamet Prasetyo, A., Dwi Yulianto, P., & Widya Wiwaha agungsp, S. (2022). Rini Marliana Agung Slamet Prasetyo Prafidhya Dwi Yulianto Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I.

- Yogyakarta Tahun 2013-2020. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha* (Vol. 2, Issue 2).
- Purwati, Y. E., & Firmansyah, A. (2024). *Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan dalam Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal*. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2389>
- Putri, & Anne. (2023). *Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Kota Payakumbuh*. 3. <https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2739>
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 411–427. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649>
- Shiva Ulqisti, & Kartika Berliani. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(3), 1671–1682. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2430>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.).